

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu wilayah atau kota harus diiringi dengan ketersediaan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat maupun pendatang. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan keberadaan fasilitas, terutama fasilitas pendidikan. Dalam pertumbuhannya, fasilitas memegang peranan penting yang dapat menunjukkan apakah suatu wilayah atau kota dapat dianggap baik atau buruk berdasarkan kelengkapan fasilitas yang tersedia. Pemerintah secara berkelanjutan berupaya meningkatkan jumlah fasilitas yang ada, menyesuaikan dengan sumber daya yang tersedia di wilayah atau kota tersebut, sehingga layanan dari fasilitas yang disediakan dapat dirasakan oleh masyarakat (Gemilang, 2019).

Pendidikan memiliki peran yang krusial dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mewariskan dan melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pendidikan Nasional berperan dalam menyediakan akses pendidikan gratis bagi seluruh warga negara Indonesia sebagai upaya pemerataan kesempatan dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan. Saat ini, meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah. Meningkatkan kualitas pendidikan memerlukan perbaikan dalam proses pembelajaran, yang merupakan tugas utama dalam mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Pendidikan adalah pendekatan sederhana dan mudah yang memungkinkan siswa untuk sepenuhnya menyadari potensi mereka dan memperoleh keterampilan dan pengetahuan. Dengan demikian, siswa secara aktif mengembangkan potensi mereka sendiri dan menguasai kualitas dari keterampilan

yang diperlukan masyarakat, keagamaan, cara mengendalikan kepribadian, dan pribadi yang baik (Sari, 2021).

Pemerintah diharuskan untuk memberikan jaminan meratanya pendidikan dan meningkatkan mutu, hubungan, serta efisiensi dalam mengelola pendidikan supaya bisa menanggapi perubahan kebutuhan sejalan pada UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, reformasi pendidikan yang berkelanjutan, terencana, dan berkelanjutan diperlukan untuk kehidupan pada seluruh bagian mulai dari lokal, nasional dan juga global (Uang et al., 2017). Pendidikan yang memadai harus disertai dengan pelayanan pendidikan yang baik. Berbagai sarana dan prasarana yang digunakan di suatu wilayah untuk memenuhi keperluan pendidikan dan menunjang proses pengajaran disebut sebagai sarana pelayanan pendidikan. Jumlah guru, jumlah siswa dan sekolah merupakan cara untuk melihat rata atau tidaknya pendidikan (Damanik, 2016). Kesenjangan dalam kondisi pendidikan dapat memicu berbagai masalah dalam bidang pendidikan. Masalah-masalah umum yang terkait dengan sarana pendidikan meliputi ketidakmerataan sarana dan prasarana di berbagai wilayah, rendahnya kualitas pendidikan, distribusi sarana yang tidak merata, serta keterbatasan ketersediaan fasilitas pendidikan yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat (Putri, 2020).

Upaya mengatasi masalah ketimpangan pada lembaga pendidikan harus didukung dengan optimalisasi berbasis distribusi perumahan. Pembagian sarana pendidikan sekolah berdasarkan pola persebaran pemukiman dikembangkan berdasarkan permasalahan dan kondisi yang ada pada suatu wilayah. Mencirikan sebaran pemukiman dari suatu wilayah ke wilayah lain ditinjau dari jarak antar

sekolah mampu menjelaskan jarak antar layanan pendidikan di sekolah. Keadaan ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan basis pendidikan sekolah menyebabkan terjadinya ketidakefisienan dalam pendistribusian sekolah termasuk biaya operasional, oleh karena itu diperlukan suatu konsep pendistribusian basis pendidikan yang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan daerah dan kebutuhan. Tersedianya basis pendidikan untuk perluasan pemerataan akses pendidikan di setiap daerah berdasarkan pola sebaran perumahan (Widianantari, 2008).

Pemerintah daerah pada tingkat kabupaten dan kota mempunyai tanggung jawab dalam memfasilitasi pelayanan dan infrastruktur demi kepentingan umum dengan maksud dalam memperbaiki kehidupan masyarakat menjadi sejahtera yang merupakan bagian pembangunan wilayah ataupun kota. Kebijakan otonomi daerah dalam memberi kewenangan untuk daerah dalam mengelola dan mengurus urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat sejalan dengan aturan yang berlaku yakni dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan ini adalah bagi pemerintah daerah untuk menjadi penanggung jawabnya dalam mengelola dan memberdayakan peluang daerah dengan menyediakan fasilitas serta infrastruktur yang dibutuhkan.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau. Dilihat dari geografis, kabupaten ini posisinya ada di koordinat $00^{\circ} 46,24'$ LU sampai $00^{\circ} 24,34'$ LS dan $101^{\circ} 30,37'$ BT sampai dengan $103^{\circ} 21,36'$ BT. Kabupaten tersebut berbatasan pada Kabupaten Siak pada sebelah Utaranya, pada bagian Selatan Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir, pada sebelah Baratnya

adalah Kota Pekanbaru dan Kampar serta Provinsi Kepulauan Riau di sebelah Timur. Ibu Kota Kabupaten Pelalawan adalah Pangkalan Kerinci. Tidak hanya itu, Kabupaten ini adalah pemekaran dari Kampar. Di tahun 2023, total penduduknya yakni 422.445 jiwa dan laju pertumbuhan penduduknya yakni sebesar 2,51% dan kepadatan penduduk 32 jiwa/km² (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan 2023). Berdasarkan data statistik tahun 2022, terdapat 236 sekolah setingkat SD/MI, 107 sekolah setingkat SMP/MTS, dan 56 sekolah setingkat SMA/SMK/MA di Kabupaten Pelalawan. Berikut adalah jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Pelalawan yakni:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2022
Langgam	37.315
Pangkalan Kerinci	103.968
Bandar Sei Kijang	23.035
Pangkalan Kuras	67.101
Ukui	43.184
Pangkalan Lesung	31.464
Bunut	16.829
Pelalawan	20.464
Bandar Petalangan	17.842
Kuala Kampar	18.086
Kerumutan	26.348
Teluk Meranti	17.271

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan 2023

Tabel 2. Jumlah Sekolah Negeri/Swasta dan Jumlah Siswa Negeri/Swasta di Kabupaten Pelalawan Tahun 2022

Kecamatan	SD/MI		SMP/MTS		SMA/SMK/MA	
	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa
Langgam	21	5604	9	1571	6	1168
Pangkalan Kerinci	29	13661	20	4355	14	5791
Bandar Sei Kijang	9	3175	7	1055	3	1135
Pangkalan Kuras	3	9711	16	2972	5	2385
Ukui	24	5975	12	1855	7	1209
Pangkalan Lesung	15	3883	7	722	3	1369
Bunut	15	2089	4	459	4	898
Pelalawan	15	2257	8	786	2	230
Bandar Petalangan	13	2067	4	748	3	675
Kuala Kampar	25	2231	8	682	3	517
Kerumutan	24	3460	5	736	3	715
Teluk Meranti	16	2152	7	726	3	571

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan 2023

Untuk menentukan apakah pembangunan pendidikan berhasil, penting untuk mempertimbangkan peningkatan kualitas pendidikan, ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan, dan menjamin bahwasanya setiap masyarakat dapat mempunyai akses yang setara. Cara untuk mengukur keberhasilan ini salah satunya yakni melakukan penilaian tentang kepastian akses dari pelayanan pendidikan dan pemerataan pendidikan pada level nasional, provinsi serta kabupaten dan kota. Indikator yang dipakai yakni APK (Angka Partisipasi Kasar) untuk jenjang SD, SMP, dan SMA pada taraf Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam melakukan penilaian tersebut.

Menurut data Angka Partisipasi Kasar (APK) yang dirilis oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan 2023, terlihat bahwa nilai APK mencakup beraneka ragam jenjang pendidikan. Adapun data APK dari beraneka macam jenjang pendidikan sebagaimana terlihat di tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan jenis kelamin

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar		
	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)	Laki-Laki dan Perempuan (%)
SD	109,44	103,76	106,67
SMP	80,37	95,84	88,48
SMA	83,41	108,17	93,69

Sumber : Statistik Pendidikan Kabupaten Pelalawan 2023

Berdasarkan informasi dari Tabel 3 tersebut, terlihat bahwasanya APK untuk jenjang pendidikan SMA atau sederajat belum mencapai 100 persen. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah anak usia SMA yang belum bersekolah pada tingkat tersebut. Dengan kata lain, jumlah murid SMA/sederajat yang bersekolah lebih sedikit dibandingkan jumlah anak yang seharusnya berada pada usia SMA (16–18 tahun). Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Pelalawan masih terdapat kendala dalam akses pendidikan di jenjang SMA/sederajat, seperti putus sekolah atau keterlambatan dalam melanjutkan pendidikan.

Menurut jenis kelamin, pada tahun 2023, nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk wanita lebih tinggi dibandingkan laki-laki di jenjang SMA/sederajat. Ini menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih banyak yang melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA dibandingkan laki-laki. Sementara itu, rendahnya

APK laki-laki dapat mengindikasikan bahwa sebagian dari mereka tidak melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi, sosial, atau memilih untuk langsung bekerja.

Berdasarkan berita yang diperoleh dari Ferry (2024) ratusan calon siswa di Kabupaten Pelalawan, Riau, berisiko tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA pada tahun ajaran 2024-2025 karena keterbatasan jumlah sekolah. Hal ini disampaikan oleh Bupati Pelalawan, Zukri Misran. Diperkirakan ada sekitar 400 siswa yang terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan, angka ini meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Zukri Misran menjelaskan bahwa kekurangan sekolah, khususnya jenjang SMA masih menjadi permasalahan pendidikan di Pelalawan. Bahkan, beberapa desa di wilayah tersebut belum memiliki sekolah menengah atas. Situasi ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan di Pelalawan sangat membutuhkan perhatian dari Pemprov Riau, terutama dalam hal pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas di sekolah-sekolah yang sudah ada. Ketersediaan fasilitas pendidikan tidak hanya memastikan hak anak-anak untuk belajar, tetapi juga memudahkan akses mereka tanpa harus menempuh jarak yang jauh ke desa lain.

Berdasarkan masalah pelayanan pendidikan yang telah diuraikan sebelumnya, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai ketersediaan fasilitas pendidikan dan strategi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan menengah tingkat atas di Kabupaten Pelalawan.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan yang sudah dipaparkan sebelumnya, masalah yang akan di teliti dapat diringkas yakni :

1. Keterbatasan jumlah sekolah menengah atas di Kabupaten Pelalawan yang mengakibatkan banyak anak-anak tidak lanjut sekolah menengah tingkat atas.
2. Dampak pembangunan sekolah yang tidak merata, sehingga membuat anak - anak sekolah menempuh akses yang jauh.
3. Dampak pembangunan sekolah yang tidak merata, membuat masyarakat harus mempunyai strategi untuk memperoleh layanan pendidikan.

C. Pembatasan Masalah

Dari latar belakang masalah serta identifikasi masalah tersebut adapun dibuat batasan masalah agar masalah tersebut menjadi terarah dan lebih jelas. Permasalahan pada penelitian dibatasi hanya pada Ketersediaan Layanan Pendidikan Menengah Tingkat Atas (dilihat dari jumlah sekolah, jumlah siswa, pola sebaran pendidikan, dan keterjangkauan layanan fasilitas pendidikan) Serta Strategi Masyarakat Untuk Memperoleh Layanan Pendidikan Di Kabupaten Pelalawan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut sehingga rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kualitas layanan pendidikan Menengah Tingkat Atas di Kabupaten Pelalawan (dilihat dari ketersediaan jumlah sekolah, jumlah siswa, sebaran sekolah, dan keterjangkauan layanan fasilitas pendidikan) ?

2. Bagaimana strategi masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan di Kabupaten Pelalawan ?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas layanan pendidikan Tingkat Menengah Atas di Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui strategi masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan di Kabupaten Pelalawan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini yaitu:

1. Memberikan informasi dan rekomendasi pada pemerintah daerah Pelalawan pada proses membuat kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan program pembangunan fasilitas pendidikan.
2. Hasil penelitian ini diupayakan bisa berguna untuk Universitas Negeri Medan terutama pada Prodi Geografi untuk menambah wawasan tentang ketersediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Pelalawan.
3. Menjadi sumber referensi dalam melaksanakan penelitian yang berhubungan pada tema atau topik yang serupa dengan karya penulis
4. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan.